HARIAN UMUM NusaBali

Badung Berikan Bantuan Hibah untuk Tenaga Pengamanan Pilkada 2015

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung memberikan bantuan hibah kepada Polresta Denpasar, Polres Badung, Kodim 1611 Badung, dalam rangka pengamanan Pilkada Badung Desember 2015, Jumat (29/5), di Puspem Badung. Penandatanganan pemberian hibah dilakukan oleh Bupati Badung AA Gde Agung, bersama Kapolresta Denpasar Kombes Pol AA Made Sedana, Kapolres Badung AKBP Tony Binsar, Dandim 1611 Badung Letkol inf Teddy Arifiyanto.

Acara itu dihadiri Wabup Badung I Made Sudiana, Sekkab Kompyang R Swandika, anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Ketua KPU Badung dan Komisioner, Ketua Panwaslu Badung, Kapolsek se-Kabupaten Badung, Danramil se-Kabupaten Badung, kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung.

Kepala Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung I Nyoman Suendi selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan, sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015, pasal 200 ayat (1) menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada APBD.

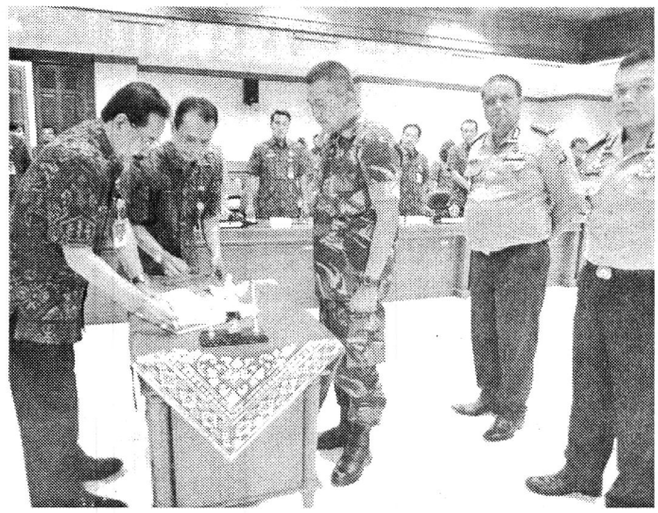

• IST

PENANDATANGANAN pemberian hibah oleh Bupati Badung AA Gde Agung, bersama Kapolresta Denpasar Kombes Pol AA Made Sedana, Kapolres Badung AKBP Tony Binsar, Dandim 1611 Badung Letkol inf Teddy Arifiyanto, Jumat (29/5), di Puspem Badung.

Suendi mengatakan, untuk Polres Badung dana yang disetujui sebesar Rp 3.826.652.000, Polresta Denpasar sebesar Rp 2.076.380.000, dan Kodim 1611 Badung dana yang disetujui sebesar Rp. 1.972.121.500. Jadi keseluruhan dana pengamanan yang dikelola TNI/Polri Tahun 2015 pada APBD Induk sebesar Rp. 7.875.153.500.

Sedangkan pada tahun anggaran 2016 untuk pengamanan, Polres Badung sebesar Rp 693.700.000, Polresta Denpasar sebesar Rp 111.000.000, dan Kodim 1611 Badung sebesar Rp 53.123.000. Sehingga total dana pengamanan yang dikelola oleh TNI/Polri pada 2016 sebesar Rp 857.823.000 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus duapuluh tiga ribu rupiah).

Bupati Badung Anak Agung Gde Agung dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Badung telah berupaya mengakomodasi seluruh proposal pengajuan dana yang dibutuhkan untuk pengamanan Pilkada Badung 2015 yang sudah dekat. "Pendanaan yang bersumber dari APBD juga diatur oleh Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 ini hendaknya dapat dipergunakan dengan baik dan bijak, dana yang dialokasikan untuk kegiatan pengamanan Pemilukada 2015 dan pengamanan pada pelantikan 2016 nanti adalah untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Badung agar dapat menggunakan hak pilihnya secara aman dan damai sehingga pelaksanaan Pemilukada 2015 dapat berjalan lancar, tertib, dan demokratis," ucap kata Gde Agung.

Dikatakannya, Kabupaten Badung dan Kota Surabaya menjadi pilot project yang mendapat pendampingan dari KPK dalam penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan berintegritas untuk seluruh Indonesia. Mengingat Badung merupakan destinasi pariwisata nasional dan manca negara, dengan terselenggaranya pemilukada yang aman, damai. dan demokratis menjadikan Badung tetap sebagai tujuan wisata aman dan nyaman. @ **as**

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Dewan Usulkan Rancang Asuransi Gagal Panen

NEGARA, NusaBali

DPRD Jembrana mulai bahas Ranperda Perlingungan Lahan Pertananian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). Dalam pembahasan itu muncul usul untuk siapkan dana asuransi jika petani gagal panen.

Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, mengatakan, setelah disetujui untuk dibahas kembali, harus ada langkah strategis dalam Ranperda PLPPB yang bertujuan untuk memproteksi maraknya alih fungsi lahan pertanian. Menurutnya, tidak akan efektif, jika Pemerintah hanya melarang petani menjual lahannya, tanpa memberi kontribusi atau timbal balik. "Yang paling tepat, kita inginkan ada asuransi pertanian ketika ada gagal panen," kata Susrama, Kamis (28/5).

Diyakini, asuransi gagal panen itu akan membuat petani menjaga kelangsungan pengelolaan lahannya. Andaikata terjadi gagal panen, petani tidak total rugi karena bisa klaim asuransi. Baginya, petani harus dilindungi dari kerugian. Fajta di lapangan, ketika petani tak ada modal lagi untuk melanjutkan penanaman, terpaksa menjual lahannya. "Ini sudah rumus pasti. Hasil panen yang mereka cari. Tapi karena gagal panen, bisa menjadi beban, akhirnya menjual tanah. Jadi bagaimana kita buat petani itu juga nyaman dan bangga jadi petani," kata Susrama.

Mengenai masalah biaya asuransi, bisa ditanggulangi dari APBD. "Kalau ada kemauan, APBD kita sangat cukup. Pasang premi asuransi untuk petani sebagai jaminan gagal panen. Jadi ketika mereka gagal panen, diberikan ganti rugi untuk bercocok tanam kembali," urainya. Di samping asuransi untuk petaka yang paling ditakuti petani, penting juga mengenai kemudahan mendapatkan bibit ataupun pupuk. Karena ketika akses tidak dipermudah, petani dipastikan akan kelimpungan. Ketika panen raya, pemerintah wajib menyalurkan dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. "Begitu juga pemberdayaan KUD, dalam rangka menyerap hasil bumi. Harus dimaksimalkan dan benar-benar dijalankan sesuai tujuan," tandasnya. **od**

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Kadisdukcapil Digerebek Satpol PP

Ada dugaan berupa laporan kepada Satpol PP, antara Bhayangkara dan DU sebagai pasangan selingkuh.

GIANYAR, NusaBali

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar Gde Bhayangkara digerebek anggota Satpol PP Gianyar. Dia digerebek saat bertamu di rumah seorang perempuan, DU, di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, sekitar pukul 16.30 Wita, Jumat (29/5). Langkah petugas ini mengejutkan Bhayangkara, DU, dan beberapa warga lain di rumah itu.

Penggerebekan ini menyusul dugaan berupa laporan kepada Satpol PP, antara Bhayangkara dan DU sebagai pasangan selingkuh. Satpol PP langsung meminta identitas berupa KTP baik milik Bhayangkara dan DU. Namun Satpol PP tak langsung menggiring mereka ke Kantor Satpol PP Gianyar.

Atas kejadian itu, Bhayangkara menghadap Kasat Pol PP Gianyar I Gede Daging di Kantor Satpol PP Gianyar, sekitar pukul 18.30 Wita, untuk mengklarifikasi langkah Satpol PP. Namun pertemuan itu berlangsung tertutup.

Usai menerima Bhayangkara, Kasat Pol PP Gianyar I Gede Daging, enggan berkomentar terkait kedatangan Bhayangkara. Pihaknya, Senin (1/6), akan memanggil DU ke Kantor Satpol PP. Dalam masalah ini, Daging mengaku tidak ada menyebut nama siapa-siapa yang diduga tersangkut masalah ini.

Saat dikonfirmasi, Gde Bhayangkara mengaku dirinya merasa difitnah pihak lain atas masalah ini. Dia menuturkan, sore itu dia berolahraga di jalan raya, pinggir Stadion Dipta, Desa Buruan. Dia tak sengaja bertemu dengan DU, PNS yang bekas salah satu stafnya waktu dia bertugas di Dinas Pariwisata Gianyar. Dia pun mampir minum untuk sekadar minum di rumah DU. Kata dia, saat Satpol PP datang ke rumah itu, dirinya dan DU ada di luar kamar. "Saya tak menyangka ada Satpol PP dengan memaksa minta KTP kepada saya, karena dipaksa saya kasi. Kalau saya dibilang berselingkuh, apanya selingkuh. Masa ada orang berselingkuh di luar kamar," jelasnya.

Atas dugaan selingkuh itu, Bhayangkara mengaku siap untuk divisum. Dirinya juga menyatakan siap memperkarakan tindakan Satpol PP jika dirinya dianggap berselingkuh dengan mantan stafnya itu. "Saya sudah jelaskan semua ini kepada Kasatpol PP Gianyar. Saya luruskan masalah ini," jelasnya. **lsa**

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 6

HARIAN UMUM NusaBali

Ranperda Pilkel Serentak

Kalangan PNS Bisa Nyalon Perbekel

SINGARAJA, NusaBali

Pansus II DPRD Buleleng mulai membahas Ranperda Pilkel serentak. Dalam ranperda itu, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) aktif juga bisa nyalon perbekel. Oleh Pansus, calon perbekel dari kalangan PNS harus mengambil cuti pada masa kampanye.

Pembahasan Ranperda Pilkel serentak itu dilakukan internal Pansus II, Kamis (28/5) di ruang Komisi II, gedung DPRD Buleleng. Rapat internal itu dipimpin Ketua Pansus II, Putu Tirta Adnyana. Dikatakan, dalam pembahasan itu ada beberapa hal yang ingin mendapat penjelasan diantaran menyangkut calon dari kalangan PNS aktif. Diantaranya, izin cuti bagi calon dari PNS aktif. Masalahnya izin cuti itu belum diatur dalam draf Ranperda. Pihaknya pun mengusulkan perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang izin cuti. Sehingga calon PNS bisa focus mengikuti tahapan kampanye, sedangkan tugas-tugas dinasnya bisa dilimpahkan sementara kepada pejabat di bawahnya. "Karena dalam draf rancangan perda yang kita terima termasuk dalam permendagri juga diatur kalau calon PNS aktif diperbolehkan, namun belum diastur pasal untuk memberikan izin cuti. Taktunya nanti ini menjadi masalah ketika PNS menjadi calon, sehingga kita usulkan pemeirntah memberikan izin cuti pada masa kampanye," katanya.

Politisi Partai Golkar dari Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini menambahkan, selain menyangkut izin cuti, Pansus juga ingin mendapat penjelasan terkait jumlah calon perbekel dalam pemilihan yang digelar serentak bergelombang maupun pemilihan antar waktu tersebut. Dalam draf rancangan perda calon minimal dua orang dan maksimal lima orang. Khusus untuk calon minimal dua orang itu, menurut Tirta perlu dipertegas kembali karena dalam klausul pasalnya dicantumkan kalau Bupati akan membatalkan pemilihan kalau ketentuan calon minimal dua orang itu tidak terpenuhi. Pertagas aturan ini untuk mencegah terjadinya permasalahan di lapangan. "Kalau dalam klausul paslanya memang ada perpanjangan masa pendaaftaran hingga dua puluh hari kalau batasan minimal calon dua orang tidak tepenuhi. Kami takutnya kalau lewat batas waktu itu ketentuan calon minmalnya tak teepnuhi pemlihan dibatalkan, dan ini harus dipertegas jangan sampai menimbulkan masalah," tegasnya.

Di sisi lain Tirta mengatakan, beberapa poin catatan hasil pembahasan rapat internal pansus ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama eksekutif dalam waktu dekat ini. Pihanya berharap eksekutif bisa memebrikan penjelasan terhadap poin catatan itu, sehingga rancangan perda yang akan ditetapkan nanti benar-benar menjadi dasar hukum yang mengikat dan ditaati. Apalagi, perda ini dibahas untuk mengatur pelaksanaan pemilihan perbekel yang dikemas secara serentak bergelombang dan pemilihan antar waktu. **k19**

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

★ Ditemukan Batang Kayu Terikat Siap Diangkut

Penebangan Liar di Tamblingan Mengkhawatirkan

Puluhan potongan kayu yang terikat rapi, itu ditemukan di kawasan hutan lindung Tamblingan. Lokasinya diperkirakan tempat transit sementara sebelum kayu dibawa keluar hutan.

SINGARAJA, NusaBali

Pohon yang hidup di hutan lindung kawasan Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, ternyata sudah banyak yang ditebang. Diduga penebangan itu dilakukan secara liar tanpa izin alias illegal loging. Salah satu indikasinya adalah penangkapan pelaku dan barang bukti dari kasus dugaan illegal loging yang berasal dari dalam hutan di Tamblingan oleh jajaran Polsek Banjar.

Hasil penelusuran NusaBali, bersama rombongan sejumlah pengedara sepeda motor gras track dari salah satu komunitas di Buleleng, Jumat (29/5) siang dengan masuk ke dalam kawasan hutan tersebut, menemukan potongan-potongan batang pohon hasil penebangan yang tercecer dan bahkan sudah ada yang terikat dan siap diangkut. Kayu-kayu tersebut terlihat seperti baru beberapa jam usai dipotong.

Tentu kondisi ini cukup mencengangkan. Masalahnya selain kawasan itu memang dilindungi, ternyata penangkapan illegal loging oleh jajaran Polsek Banjar tidak membuat surut aksi penebangan itu. NusaBali bersama sejumlah penunggang kuda besi, masuk ke dalam hutan lindung itu dari persimpangan jalan menuju Danau Tamblingan, melintasi jalan tanah yang bisa dengan mudah dilewati kendaraan roda empat, sekitar pukul 12.30 Wita. Dari sini jalan tanah ini, kemudian rombongan menyusuri jalan setapak penuh rintangan ranting-ranting pohon. Beberapa diantara rombongan harus jatuh bangun menyusuri medan yang sulit di tengah hutan. Setelah menyusuri jalan setapak sejauh sekitar 1 kilometer, rombongan sudah menemukan puluhan potongan-potongan kayu dengan ukuran sama sekitar 2,5 meter berjejer bahkan sudah ada yang teri-

1

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

Sambungan. --

• NUSABALI/SUDIRTA

BUKTI puluhan potongan kayu dengan ukuran sama yang ditemukan di salah satu titik di kawasan hutan lindung Tamblingan.

kat dan siap diangkut. Anehnya dilokasi ditemukan puluhan potongan kayu itu tidak terlihat ada bekas penebangan. Diduga puluhan potongan kayu yang diantaranya sudah terikat rapi, ditebang di lokasi berbeda di kawasan hutan lindung Tamblingan. Lokasi ditemukan puluhan potongan kayu diperkirakan sebagai tempat transit sementara sebelum kayu itu dibawa keluar hutan. Salah satu jenis kayu yang telah dipotong-potong dengan ukuran sama dan terikat itu adalah jenis Pohon Peji. Sedangkan sisanya tidak diketahui persis jenisnya. "Ini sudah bukti, memang ada penebangan liar di sekitar sini," ucap salah peserta bernama Kumkum.

Rombongan sejatinya berniat menyusuri lokasi penebangan kayu tersebut. Namun karena medan yang cukup berat dan waktu yang tidak memungkinkan, rombongan akhirnya memutuskan untuk keluar hutan. Rombongan merasa dengan melihat potongan kayu yang sudah terikat itu, perjalanan menyusuri dugaan illegal loging di kawasan hutan lindung itu sudah cukup bukti. "Kalau kita masuk lagi, ini bisa kehabisan waktu, kita juga tidak bawa bekal apapun, air juga lupa kita bawa," ujar Andre salah satu peserta.

Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang sempat dikonfirmasi ketika ditemui di Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada pada pagi harinya mengaku prihatin dengan dugaan praktek illegal loging yang ada di dalam kawasan hutan lindung Tamblingan. Bupati Putu Agus mengaku sudah mendapat informasi terkait dengan penangkapan pelaku illegal loging di kawasan hutan Tamblingan. "Bayangkan kita kerja keras tanam pohon dibeberapa tempat, ternyata di kawasan hutan yang dilindungi justru ada penebangan liar. Kalau itu terbukti, itu pelanggaran yang keras buat saya," katanya.

Menurut Bupati, pelanggaran atas pencurian kayu yang ada dihutan lindung semestinya diberikan hukuman yang berat sesuai undang-undang. Tindak tegas itu untuk memberikan efek jera bagi yang lain agar tidak berbuat yang sama lagi. "Saya sangat kecewa, mereka yang terbukti agar dihukum lebih berat. Jangan sampai ini terulang lagi," tandasnya. **k19**

2

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

Sebulan Pasca Penggusuran Warga 44 KK dari Pemukiman

Tepi Danau Tamblingan

Pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan Mulai Wujudkan Taman

Bupati Buleleng Agus Suradnyana ikut terjun pantau jajaran SKPD bantu pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan lakukan penataan dan pembuatan taman di tepi Danau Tamblingan, Jumat pagi

SINGARAJA, NusaBali

Lahan bekas pemukiman tepi Danau Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng sudah tertata apik. Sebagian lahan ditanami pohon Cemara Kipas, sebagian lagi dijadikan taman dengan beragam jenis tanaman hias dan bunga. Penataan yang

• NUSABALI/SUDIRTA

Aksi soal bikin taman di tepi Danau Tamblingan, Jumat (29/5).

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 1

HARIAN UMUM NusaBali

Sambungan - - -

● NUSABALI/SUDIRTA

Aksi soal penataan kawasan bekas pemukiman warga di tepi Danau Tamblingan, Jumat (29/5).

telah berlangsung selama sebulan ini terus dilakukan, termasuk Jumat (29/5), denga mengerahkan jajaran SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Dalam aksi sosial penataan lahan bekas pemukiman di tepi Danau Tamblingan, Jumat kemarin, jajaran SKPD lingkup Pemkab Buleleng bahu membahu dengan krama dari Catur Desa Adat Dalem Tamblingan (Desa Pakraman Munduk, Desa Pakraman Gobleg, Desa Pakraman Gesing, Desa Pakraman Umajero). Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana juga terjun bersama Wabup Nyoman Sutjidra, serta para pimpinan SKPD.

Kegiatan penataan lokasi bekas pemukiman tepi Danau Tamblingan kemarin dipimpin langsung oleh Pengrajeg Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, I Gusti Agung Ngurah Paradnyan, bersama Tim 9 Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Dalam kegiatan kemarin, penataan difokuskan ke pembuatan taman dengan membikin beberapa gundukan tanah berukuran besar.

Nah, di atas gundukan tanah itu kemudian ditanami beragam jenis bunga, tanaman hias, dan rumput. Tanaman hias yang ditanam, antara lain,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

2

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 1

HARIAN UMUM NusaBali

sambungan - - -

Pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Pisang Kipas dan Kana. Khusus untuk rumputnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Buleleng mendatangkan sebanyak dua Truk bintak rumput.

"Kami hanya membantu pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan dalam penataan ini. Intinya, lokasi ini dikembalikan sebagai kawasan konservasi, sehingga lingkungan setempat menjadi asri," ungkap Kepala DKP Buleleng, I Nyoman Genep, kepada NusaBali di sela-sela penataan kawaasan bekas pemukiman Danau Tamblingan, Jumat kemarin.

Menurut Nyoman Genep, penataan lokasi bekas pemukiman 22 kepala keluarga (KK) krama bendega dan 22 KK warga nelayan di tepi Danau Tamblingan ini belum seberapa. Saat ini, penataan baru sebatas penanaman pohon dan pembuatan taman.

Penataan baru berjalan selama sebulan, sejak 25 April 2015 lalu. Penataan akan terus dilakukan secara bertahap. Nantinya, kawasan ini akan ditata sesuai dengan grand design berdasar usulan dari SKPD terkait yang dikoordinasikan dengan keinginan dari pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan.

"Nanti semua usulan dari SKPD terkait kita bahas bersama dengan pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Keinginan catur desa seperti apa? Tentu hasilnya nanti menjadi sebuah gagasan yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD terkait," katanya.

Nyoman Genep mengungkapkan, poin utama dalam penataan kawasan ini adalah pembuatan saluran drainase, sebagai upaya mengatasi luapan air danau atau air hujan di musim penghujan. Di samping itu, pembangunan di atas kawasan bekas pemukiman ini sedapat mungkin harus mengurungi tutupan tanah.

"Kalau nanti ada bangunan yang diinginkan pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, mungkin bentuknya seperti panggungan. Sebab, sebisa mungkin diupayakan mengurangi tutupan lahan yang ada."

Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana menilai apa yang telah dilakukan pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan dan SKPD terkait, sudah sangat tepat untuk mengembalikan fungsi lahan bekas pemukiman tepi Danau Tamblingan sebagai kawasan konservasi. Menurut Agus Suradnyana, pihaknya juga melestarikan keberadaan Danau Tamblingan dengan menebar benih ikan.

Masalahnya, belakangan jenis ikan yang biasa ditebar dan hidup di Danau Tamblingan sudah mulai habis akibat dimakan jenis ikan Zebra. "Jadi, restoking kita akan gencarkan juga. Nanti kita pilih benih yang lebih besar, sehingga ikan Zebra tidak bisa memakan benih yang kita tebar. Kita upayakan ekosistem di Danau Tamblingan bisa tetap terjaga," jelas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Rumah-rumah milik warga di pemukiman tepi Danau Tamblingan sendiri sebelumnya dibongkar paksa, 25 April 2015 pagi. Pembongkaran dilakukan setalah warga kelompok nelayan tidak mengindahkan maklumat dan batas toleransi pengosongan lahan yang diberikan pihak Catur Desa Adat Dalem Tamblingan.

Pembongkaran hari itu juga disertai dengan pembakaran material bangunan rumah yang telah dirobohkan. Pembongkaran di-back up langsung Satpol PP Pemkab Buleleng, dengan pengawalan ketat pasukan Dalmas Polres Buleleng dan petugas TNI. Eksekusi pagi itu dipimpin langsung Pengrajeg Adat Dalem Tamblingan, I Gusti Agung Ngurah Pradnyan, didampingi Tim Sembilan. Bahkan, Kapolres Buleleng AKBP Kurniadi juga terjun ke lokasi mengecek persoanelnya. Rumah-tumah yang diesekusi itu berada di atas lahan yang diklaim sebagai Tanah Pelaba Pura Gubug.

Secara keseluruhan, ada 44 KK yang tergusur dari pemukiman tepi Danau Tamblingan. Sebanyak 22 KK di antaranya merupakan krama bendega, kelompok warga adat yang kesehariannya bertugas menjaga kesucian kawasan dan pura-pura di sekitar Danau Tamblingan. Kelompok bendega 22 KK ini masuk dalam struktur pakraman Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Sedangkan 22 KK lagi kelompok nelayan yang juga asal Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk.

Pasca rumah-rumahnya dibongkar, krama dari kelompok bendega maupun nelayan kini harus *madunungan* (mengungsi sementara) ke sejumlah tempat berbeda. Sebagian besar dari mereka kembali ke tempat asal sanak familinya di wilayah atas yakni di Banjar Dinas Tamblingan untuk memulai kehidupan baru. Sebagian lagi pilih madunungan di kawasan Gumalak yang berjarak sekitar 500 meter dari bekas pemukiman tepi Danau Tamblingan. **k19**

3

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 1

HARIAN UMUM NusaBali

Staf Kejati Bali Pembobol Uang Barang Bukti Korupsi

Tidak Banding, Budi Jalani Penjara 19 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Staf Tata Usaha Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bali, Nyoman Budi Permadi yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi barang bukti kasus IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri) Denpasar memastikan tidak akan menempuh banding atas putusan majelis hakim. Dengan demikian, Budi dipastikan akan menjalani 19 tahun penjara. Pasalnya, selain divonis 15 tahun penjara, Budi juga tidak mampu membayar kerugian negara dan denda sehingga hukumannya ditambah 4 tahun.

Hal ini dinyatakan kuasa hukum terdakwa, Ni Ketut Rima Nurdiana pada Jumat (29/5). Ia mengatakan pihaknya sudah menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding. Keputusan ini dibuat setelah pihaknya berkordinasi dengan Budi dan keluarganya. "Terdakwa dan keluarga sudah menyatakan tidak akan banding," jelasnya.

Selain tidak mengajukan banding atas putusan 15 tahun penjara, Budi juga dipastikan tidak mampu membayar kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar dan denda Rp 200 juta. Dengan demikian sesuai putusan, Budi harus menanggung pidana penjara tambahan selama empat tahun. Sehingga total, pidana penjara yang harus dijalani mantan staf Kejati Bali ini yaitu 19 tahun. "Sudah tidak mampu membayar kerugian negara dan denda. Apalagi utangnya di luar juga masih banyak," pungkas Rima. rez

• DOKNUSABALI

NYOMAN Budi Permadi (kiri) digiring petugas Kejaksaan usai divonis 15 tahun penjara.

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

LINTAS

● NUSABALI/DEWA

Kantor UPT Perkebunan di Desa Katung, yang mangkrak dan sudag terbengkalai puluhan tahun.

Terbengkalai, Kantor UPT Pemprov Jadi 'Rumah Hantu'

BANGLI, NusaBali

Keberadaan Kantor UPT Perkebunan Pemprov Bali yang berlokasi di Desa Katung, Kintamani, Bangli sejak puluhan tahun tidak lagi terpakai. Semenjak itu, aset Pemprov Bali ini terbengkalai dan tidak terurus . Nampak di lokasi, dua unit bangunan yang beratapkan seng tersebut, seperti rumah hantu. Pasalnya, bangunan yang sudah lapuk ini terkesan menyeramkan.

Bahkan tidak ada warga setempat yang berani memasuki bangunan itu. Sementara, di luar bangunan semak-belukar tampak tumbuh subur hingga menjalar ke dalam bangunan.

Bendesa Adat Katung, I Ketut Mastrem, saat dikonfirmasi, membenarkan bangunan tersebut sejak puluhan tahun tidak terpakai alias terbengkalai. Kondisi bangunan kini telah keropos sehingga kurang sedap dipandang mata. "Dulunya bangunan ini merupakan bekas kantor UPT Perkebunan Pemprov Bali. Entah apa alasannya hingga bangunan ini tidak lagi dipakai," ujar, pria yang juga anggota DPRD Bangli ini, Kamis (28/5).

Dalam beberapa kali paruman dengan krama adat, persoalan bangunan tua ini kerap muncul. Warga ingin supaya bangunan itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak merusak pemandangan. Mengenai hal itu, pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan supaya bisa menfaatkan lokasi bangunan untuk dikelola adat. Salah satunya, untuk kantor kelompok tani atau hal lainnya. "Kalau memang diizinkan kami manfaatkan untuk kepentingan pertanian, aset Dinas Perkebunan Bali tersebut," ujarnya. cr53

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Ombudsman Undang Kepala Pengadilan Negeri Se–Bali

Yang Hadir Hanya Hakim 3 PN

• NUSABALI/HENDRA

OMBUDSMAn Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali menggelar coffee morning bersama ketua Pengadilan Negeri, di Jalan Diponegoro, Denpasar, Jumat (29/5) siang.

Yang hadir hanya hakim dari PN Denpasar, Bangli, dan Karangasem. Persoalan yang dibahas antara lain soal akses ke pengadilan, serta layanan.

DENPASAR, NusaBali

Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali mengundang Kepala Pengadilan Negeri se–Bali, Jumat (29/5), dalam acara coffee morning di kantor ORI di Jalan Diponegoro, Denpasar. Namun hanya hakim perwakilan dari PN Denpasar, PN Bangli, dan PN Karangasem yang datang. Sementara Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab, juga absen. Dia diwakili Asisten Bidang Pengawasan ORI Bali Dhuha Mubarok dan Asisten Bidang Pencegahan Ni Nyoman Sri Widiyanthi.

Dhuha Mubarok mengatakan, coffee morning ini sudah menjadi tradisi bulanan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Sejauh ini Ombudsman memang tidak banyak menerima laporan masyarakat terkait Pen-

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Sambungan - - -

gadilan Negeri. Hanya tercatat satu pelapor yang mengadu tidak terlayani maksimal di PN Denpasar. Tidak terlalu urgen memang, tapi bagaimanapun juga tetap kita tindaklanjuti dan sudah ada klarifikasi sehingga sudah tidak ada masalah lagi," kata Mubarok.

Selain itu, Mubarok juga masih mendengar terkait teknis akses masyarakat umum ketika akan berperkara. Mulai dari ketidakramahan pegawai, akses informasi yang kurang terbuka, hingga keluhan sejumlah pengacara dari organisasi KAI yang menyampaikan bahwa di beberapa PN tidak semua hakim menanyakan atau mempersoalkan berita acara pengambilan sumpah. Namun ada kebijakan dari PN bahwa ketika mendaftarkan acara, harus melaporkan berita acara pengambilan sumpah tersebut.

Selebihnya, Mubarok menyampaikan keluhan masyarakat yang menanyakan biaya berperkara di PN, jadwal sidang yang sering ada penundaan mendadak hingga muncul plesetan 'tunda-tunggu dana' serta keberadaan Pos Bantuan Hukum (Bakum).

Menanggapi kritikan dari Ombudsman, satu per satu hakim memberikan penjelasan.

I Wayan Sukanila MH dari PN Denpasar mengatakan terkait laporan masyarakat yang tidak mendapat pelayanan, sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah lagi. Sementara terkait berita acara pengambilan sumpah, menurut Sukanila, PN tidak pernah membedakan pengacara dari KAI atau Peradi. Yang jelas dalam pendaftaran perkara, PN Denpasar memang mewajibkan pengacara untuk melampirkan berita acara pengambilan sumpah. "Kebijakannya memang seperti itu. Kalau pendaftaran, harus lampirkan berita acara pengambilan sumpah. Ini sebagai antisipasi, jika setelah perkara masuk tidak dipermasalahkan oleh pihak lawan. Lebih baik dilengkapi dari awal supaya nanti tidak dipermasalakan," jelasnya.

Terkait akses informasi, Sukanila mengklaim PN Denpasar sudah sangat terbuka. "Kami ada meja informasi, juga ada informasi petunjuk jika gugatan seperti apa. Sebaiknya masyarakat baca itu dulu, datang ke PN mau apa. Ajukan gugatan prosesnya ke mana, di mana, dan berapa biaya semua ditempel secara transparan. Cuma masyarakatnya yang *gak* mau tanya. Meja informasi siap, pasti dilayani," ujarnya diamini Hakim PN Bangli AA Putra Wirat Jaya SH, Hakim PN Amlapura Adhi Gandha Wijaya, dan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Sudaryadi SH MH.

Sementara terkait penundaan sidang, Sukanila mengatakan pasti ada alasan di balik itu. "Mudah-mudahan plesetan itu *gak bener*. Karena pasti ada alasan sehingga ditunda. Misal saksi belum lengkap, hakim memberikan ceramah atau undangan atau alasan lain sehingga persidangan yang terjadwal terpaksa ditunda. Tapi kami pastikan penundaan sidang diberikan penjelasan," ujarnya.

Untuk Pos Bakum, Sukanila mengakui di PN Denpasar kurang berjalan. "Denpasar tidak perlu itu. Karena meskipun ada yang piket, ternyata tidak digunakan oleh masyarakat," imbuhnya.

Ditambahkan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Sudaryadi SH MH, antara dua organisasi advokat hanya Peradi yang bisa diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi. "Kalau mau disumpah, harus melebur dulu ke Peradi," ujarnya. n

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 3